



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MOMENTUM PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sektor pertanian, merupakan salah satu sektor yang menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif di awal tahun 2025. Kondisi tersebut terutama didukung oleh subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan jasa pertanian. Sektor pertanian berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu 1,11 persen dari total pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 sebesar 4,85 persen. Subsektor penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan sektor pertanian adalah tanaman pangan, termasuk komoditas padi dan jagung sebesar 42,62 persen; subsektor tanaman perkebunan, termasuk kelapa sawit, tumbuh 3,14 persen; subsektor jasa pertanian tumbuh 12,65 persen; dan subsektor peternakan tumbuh 8,33 persen. Beberapa hal menjadi latar belakang tingginya pertumbuhan sektor pertanian, di antaranya adalah panen raya yang berhasil meningkatkan produksi pertanian, terutama komoditas padi dan jagung.

Dari sisi konsumsi, pertumbuhan sektor pertanian pada kuartal I tahun 2025 didorong oleh meningkatnya permintaan berbagai komoditas, seiring dengan perayaan Ramadan dan Idulfitri. Selain konsumsi dalam negeri, ekspor sektor pertanian juga turut meningkat di awal tahun 2025. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai US\$0,57 miliar, atau naik 1,73 persen *month to month* (mtm) pada Maret 2025. Di sisi lain, produksi beras yang melimpah sejak awal tahun 2025 memunculkan optimisme terhadap ketersediaan stok beras sepanjang tahun 2025. Hal ini bahkan mendorong pemerintah merencanakan akan mengekspor beras ke Malaysia. Peningkatan produksi beras dan jagung di kuartal awal tahun 2025 ini dipengaruhi oleh tingginya luas panen, yang didukung oleh kondisi cuaca dan iklim yang normal pada musim tanam sebelumnya. Situasi ini berbanding terbalik dengan awal tahun 2024, ketika fenomena El Nino menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah dan menurunkan produksi beras secara signifikan.

Momentum pertumbuhan sektor pertanian yang terjadi saat ini perlu dipertahankan, terutama karena musim panen raya sudah berakhir dan berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan. Berdasarkan kondisi yang terjadi, tampak bahwa produksi sektor pertanian di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh luasan lahan pertanian dan kondisi iklim atau cuaca. Di sisi lain, stabilitas konsumsi dalam negeri juga perlu dijaga untuk mempertahankan momentum pertumbuhan berbagai subsektor pangan setelah selesainya perayaan Idulfitri. Upaya mempertahankan momentum ini, khususnya subsektor pangan, dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan. *Pertama*, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempertahankan lahan pertanian, baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan. Beberapa daerah sudah memperketat proses perizinan alih fungsi lahan pertanian. Hal ini perlu diapresiasi dan didukung oleh pemerintah pusat. *Kedua*, perlu dilakukan riset dan modernisasi pertanian sebagai bagian dari intensifikasi lahan pertanian. Perubahan iklim masih menjadi ancaman bagi stabilitas produksi pangan. Untuk itu, penerapan teknologi dalam penyediaan benih yang lebih berketahanan iklim dan otomatisasi pertanian perlu dilakukan.

Ketiga, penguatan peran Perum Bulog dalam menyerap, menyimpan, dan menyalurkan stok pangan sebagai bagian dari stabilisasi pasokan dan harga di pasar. *Keempat*, mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman,

menyampaikan bahwa kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 28,5 persen dari total angkatan kerja nasional. Untuk mempertahankan nilai kontribusi tersebut, maka diperlukan regenerasi petani dengan dukungan pendampingan penyuluh pertanian. Tanpa adanya regenerasi maka Indonesia dapat kehilangan kesempatan untuk memajukan sektor pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan. *Kelima*, sinkronisasi seluruh kebijakan terkait pangan dengan membangun sinergitas seluruh *stakeholder*.

Atensi DPR

Sektor pertanian, khususnya subsektor pangan, menjadi sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun 2025. Hal ini menjadi kesempatan bagi semua pihak terkait untuk memanfaatkan momentum sebagai upaya pencapaian ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Komisi IV DPR RI, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dapat secara aktif memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pencapaian ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tersebut juga perlu dilakukan, baik terhadap kebijakan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kunjungan lapangan ke daerah sentra pangan, gudang Perum Bulog, dan daerah rawan pangan diperlukan untuk mendapatkan informasi kondisi terkini di lapangan. Komisi IV DPR RI juga perlu memastikan pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI dapat memperkuat tata kelola pangan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional.

Sumber

antaranews.com, 8 Mei 2025;
cnbcindonesia.com, 5 Mei 2025;
finance.detik.com, 9 Mei 2025;
kalitim.antaranews.com, 8 Mei 2025;
kompas.id, 6 Mei 2025;
mediaindonesia.com, 8 Mei 2025;
metrotvnews.com, 5 Mei 2025;
nasional.kontan.co.id, 21 April 2025; dan
tempo.co, 6 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*